

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SAMOSIR DALAM MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN DI KABUPATEN
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

ANDRE CHRISTIAN HASIBUAN

NPP. 29. 0083

*Asdaf Provinsi Sumatera Utara
Program Studi
Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email:

hasibuan.andre29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development explains that the family planning program is a strategic program in tackling the large population growth rate in Indonesia through child birth control, the ideal distance and age for childbirth and pregnancy, through offerings, protection, and assistance. in accordance with reproductive rights in realizing a quality family. The implementation of the family planning program did not run without problems. Along with the times, the family planning program has weakened, as indicated by the decline in family planning participants.***Objective:** *This study aims to determine the effectiveness of family planning services by the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning in Samosir Regency in controlling birth rates in Samosir Regency.***Method:** *This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation***Result:** *The effectiveness of family planning services by the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning in Samosir Regency (DISP3A PPKB Samosir Regency) in controlling the birth rate in Samosir Regency, North Sumatra Province, has not been effective because it is still 67.8% of the target that has been set. fulfilled by DISP3A PPKB Samosir Regency and there are only four officers at the extension center who are responsible for disseminating the family planning program to 28 villages/kelurahan..***Conclusion:** *The effectiveness of family planning services carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control and Family Planning in Samosir Regency has not been effective. The obstacle faced is the factor of customs in the North Sumatra Province in general and Samosir Regency in particular, which still adheres to the patriarchal system, then the dependence of the community on the government. priority scale on family planning development, as well as refreshing family planning cadres.*

Keywords: *Effectiveness, Service, Family Planning*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa program KB menjadi program strategis dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk yang besar pada Negara Indonesia melalui kontrol kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan kehamilan, melalui penawaaran, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaan program KB tidak berjalan tanpa kendala. Seiring berkembangnya zaman, program KB melemah, ditandai dari menurunnya peserta KB. **Tujuan:** untuk mengetahui efektivitas pelayanan keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir dalam mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Samosir. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Efektivitas pelayanan keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir (DISP3A PPKB Kabupaten Samosir) dalam mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, belum efektif karena masih 67,8 % dari target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi oleh DISP3A PPKB Kabupaten Samosir dan hanya terdapat empat orang petugas di balai penyuluh yang bertanggungjawab untuk mensosialisasikan program KB untuk 28 desa/kelurahan. **Kesimpulan:** efektivitas pelayanan keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir belum efektif. Hambatan yang dihadapi adalah faktor adat istiadat di daerah Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kabupaten Samosir khususnya yang masih menganut sistem patrilineal selanjutnya adanya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut maka upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yang berkala kepada masyarakat tentang manfaat KB, menggunakan pendekatan skala prioritas pada pembinaan KB, serta refreshing kader KB.

Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, Keluarga Berencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di dunia maupun di Negara Indonesia saat ini semakin meningkat dan tidak terkontrol. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan beberapa variabel yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk disebabkan beberapa variabel yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Badan Pusat Statistik (BPS), dalam informasi yang dilansir Kompas.com, daerah – daerah padat penduduk pada tahun 2020 yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Atas data diatas, jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2016 yaitu 124.496 jiwa, pada tahun 2017 meningkat menjadi 125.099 jiwa, tahun 2018 meningkat menjadi 125.816 jiwa, tahun 2019 meningkat menjadi 126.188 jiwa dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 136.441 jiwa. Angka TFR yang tinggi ini akan menyebabkan berbagai permasalahan di Kabupaten Samosir, apabila tidak ditangani, akibatnya Kabupaten Samosir di masa yang akan datang terjadi ledakan penduduk yang mengakibatkan Kabupaten Samosir akan memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa program KB menjadi program strategis dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk yang besar pada Negara Indonesia melalui kontrol kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan kehamilan, melalui penawaaran, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaan program KB tidak berjalan tanpa kendala. Seiring berkembangnya zaman, program KB melemah, ditandai dari menurunnya peserta KB.

Permasalahan terkait penurunan jumlah peserta KB tidak terjadi pada skala nasional saja, tetapi juga pada skala daerah. Atas data pada tabel diatas jumlah PUS yang tidak ber-KB dari tahun 2016 ke 2017 terjadi kenaikan, pada tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan dan kenyataan yang terjadi juga bahwa jumlah keluarga yang belum mengikuti Program KB di Kabupaten Samosir masih relatif tinggi. Menangani permasalahan tersebut , BKKBN berupaya meningkatkan peran pemerintah daerah untuk memperkuat usaha pencapaian target atau sasaran agar lebih bersentuhan langsung dan berdaya guna bagi masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir memberikan tugas kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut DISP3A PPKB Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Program KB.

Permasalahan-permasalahan tersebut menandakan bahwa kurangnya pelayanan program KB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang mengakibatkan berbagai permasalahan yang terjadi pada bidang KB di Kabupaten Samosir. Dari berbagai permasalahan program KB tersebut, penulisan ini wajib menjadi perhatian dan pertimbangan bahwa masalah ini di anggap penting untuk di teliti, agar menemukan solusi pemecahan masalah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru terutama bagi Kabupaten Samosir. Oleh Sebab itu penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMOSIR DALAM MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN DI KABUPATEN SAMOSIR.”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa program KB menjadi program strategis dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk yang besar pada Negara Indonesia melalui kontrol kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan kehamilan, melalui penawaaran, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaan program KB tidak berjalan tanpa kendala. Seiring berkembangnya zaman, program KB melemah, ditandai dari menurunnya peserta KB.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Dewi Suhartini (2019) , berjudul “Efektivitas Pelayanan BKKBN dalam Penurunan Angka Kelahiran di Kota Makassar”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Pelayanan KB yang berkualitas berdampak pada kepuasan masyarakat yang di layani dan tetap berdasarkan kode etik dan standar pelayanan yang di tetapkan. Inovasi dari pelayanan KB dan kompetensi tenaga yang memberikan pelayanan sangat menentukan kualitas pelayan yang di berikan selain faktor lain seperti: alat dan obat kotrasepsi, prasarana dan saran penunjang. Pelayan KB yang berkualitas adalah pelayanan yang memberikan tingkat komplikasi yang rendah dan tingkat kegagalan yang rendah. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa di kota Makasar para masyarkat masih kurang menerima konseling sehingga

pemutusan pemilihan alat/cara KB belum sepenuhnya di dasarkan pada pengetahuan yang cukup. Temuan di lapangan itu membuktikan bahwa perlunya informasi yang cukup akan sangat menunjang keberhasilan program KB. Penulisan Dewi Suhartini menunjukkan bahwa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB melalui televisi maupun poster/pamflet memperlihatkan pengaruh yang sangat baik terhadap kepesertaan ber KB

Kedua, Dr. Budiman Purba, M.AP (2018) dari , berjudul “Analisis Bahaya Kebakaran Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta” .Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dalam Mengurangi Angka Kelahiran di Kota Medan

Ketiga, Dewi Febriani, (2020) yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana yang di laksanakan BKKBN provinsi Jambi untuk mengendalikan angka kelahiran menghadapi beberapa hambatan seperti: kurangnya petugas lapangan penyuluhan, bertambahnya penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mempengaruhi *unmet need*. Dalam mengatasi permasalahan tersebut BKKBN mengambil solusi yaitu: meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas lapangan penyuluhan, menjamin ketersediaan kotrasepsi, meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal pemerintah harus terus membaca permasalahan dan memberikan solusi yang tepat, cepat dan produktif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan efektivitas pelayanan keluarga berencana dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor penghambat dalam efektifitas pelayanan keluarga berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir dalam mengatasi hambatan efektifitas pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Samosir.

II. METODE

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Efektifitas Pelayanan Keluarga Berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir dalam Mengendalikan Angka Kelahiran di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara

A. Pencapaian Tujuan Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran di Kabupaten Samosir

Pencapaian merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan dipandang sebagai suatu proses. Berbicara tentang pencapaian tujuan maka akan berhadapan pada kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dalam suatu organisasi apapun bentuknya, tentu akan berhadapan dengan pencapaian tujuan.

1. Waktu Pencapaian

Ketepatan waktu diartikan sebagai keselarasan antara agenda kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan, ketepatan waktu sebagai suatu tindakan pelayanan yang memiliki estimasi dan prediksi waktu yang akurat dan cepat. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila menunjukkan kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketepatan waktu dalam mencapai target sasaran. Pelayanan yang lebih cepat tentunya dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat, sedangkan pelayanan yang memakan waktu diluar perkiraan menjadikan masalah semakin sulit diselesaikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan. Kepuasan masyarakat akan pelayanan KB dari DISP3A PPKB Kabupaten Samosir berjalan dengan cepat dan akurat. Hal ini dikarenakan keluhan yang dialami pasien menjadi pedoman pelaksana teknis untuk merekomendasikan metode KB yang meminimalisir efek samping sebelumnya dan juga menemukan kecocokan pada hormon tubuh pasien. Ini berpengaruh pada kepuasan PUS dalam mengikuti program KB dan tidak melakukan *drop out*. Perlu diperhatikan bahwa Program KB memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kecocokan dan pilihan dari PUS itu sendiri, akan tetapi fasilitas yang disediakan juga untuk penanganan efek samping yang timbul dan sebagai sarana menyalurkan solusi dalam mengatasi masalah pelayanan KB. Ketepatan waktu dalam pelayanan sudah dimiliki Dinas untuk menjadi *problem solver* secara cepat dan tepat.

2. Sasaran

Pelaksanaan sasaran perlu memperhatikan perjanjian kinerja. Adanya perjanjian kinerja dapat membentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu Atas tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Poin strategi “Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga” khususnya pada indikator “Angka Persentase Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods) mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon)”.

Sasaran strategis dalam mewujudkan visi misi DISP3A PPKB Kabupaten Samosir adalah:

1. Meningkatnya tata kelola akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir
2. Menurunnya serta wajarnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Samosir
3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
4. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pelaksanaan sasaran strategis perlu memperhatikan perjanjian kinerja. Data LAKIP di atas memperlihatkan pemetaan strategi DISP3A PPKB Kabupaten Samosir. dalam sasaran dalam pencapaian target belum efektif, Aparatur DISP3A PPKB Kabupaten Samosir masih mencapai 67,8 % dan dari 14.896 PUS yang mengikuti program KB diantaranya IUD sebanyak 1.042 peserta, MOP sebanyak 76 peserta, MOW sebanyak 3.663 peserta, Implant sebanyak 1.472 peserta, Suntik sebanyak 3.250 peserta, Suntik sebanyak 3.250 peserta, Pil sebanyak 578 peserta, dan Kondom sebanyak 1.042 peserta akan tetapi dari segi pelayanan yang telah dilakukan sudah baik buktinya sudah membuat pelayanan khusus bagi masyarakat yang tidak mau lagi melanjutkan program KB (Drop Out) dari program KB.

3. Dasar Hukum

Unsur yang menentukan kualitas kebijakan suatu instansi adalah tingkat keterkaitan kebijakan terhadap keadaan lingkungan sekitar. Masyarakat membutuhkan suatu regulasi atau peraturan yang bersifat fleksibel, dalam artian mampu beradaptasi dan melakukan penyesuaian dengan situasi yang dihadapi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pembuatan kebijakan oleh *Decision-Maker* tidak dilakukan oleh individu seorang pimpinan semata, namun hal ini tercipta dan dapat diterapkan sampai ke lingkungan penduduk karena adanya beberapa pihak yang diikutsertakan dalam perumusan kebijakan. Atas pengamatan penulis pada saat pelaksanaan penulisan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil kebijakan DISP3A PPKB Kabupaten Samosir tidak mengikutsertakan masyarakat atau *stakeholder* dalam pengambilan kebijakan karena kebijakan yang ada langsung dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

B. Integrasi Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran di Kabupaten Samosir

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

1. Prosedur

Prosedur merupakan suatu langkah – langkah yang dilewati dalam melaksanakan suatu kegiatan dan telah memiliki standar tertentu. Petunjuk pelaksanaan melalui SOP yang jelas berpedoman dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat mendukung optimalisasi kesejahteraan masyarakat terhadap aspek kependudukan. Untuk itu penulis menelusuri alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas DISP3A PPKB Kabupaten Samosir dalam rangka mempertahankan keberlangsungan pelayanan KB. Analisis efisiensi kebijakan dan pelaksanaan diawali dengan menyelidiki sistematis perencanaan dan program yang dirumuskan.

Proses tindakan dilakukan secara berjenjang dan bertahap berupa koordinasi terhadap laporan temuan kegagalan KB dari Pemerintah Provinsi hingga ke PKB. Atas mekanisme pelayanan Kegagalan KB oleh DISP3A PPKB Kabupaten Samosir di atas alternatif yang tersedia sangat representatif untuk menggambarkan keterlibatan DISP3A PPKB dalam memberikan layanan yang terbaik bagi pasien. PUS yang menerima layanan KB akan diberikan jaminan penuh terhadap keberlangsungan penggunaan KB serta reaksi tubuh terhadap alokon yang dipilih sebagai metode KB. Alternatif juga dilengkapi dengan proses dan mekanisme yang sistematis dan hierarkhis sehingga dapat terkoordinasi dengan baik.

2. Sosialisasi

Maclever mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (2013:175), Adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. DISP3A PPKB Kabupaten Samosir harus mengadakan suatu fasilitas komunikasi yang memadai untuk diakses PUS sebelum pelayanan dilaksanakan. Menurut Mangkunegara (2000) yang di kutip dari Rensius indikator-indikator komunikasi antara

lain adalah kemudahan dalam memperoleh informasi, intensitas komunikasi, tingkat pemahaman pesan dan perubahan sikap.

a. **Kemudahan dalam Memperoleh Informasi**

Keberadaan Informasi merupakan faktor yang paling essential untuk memberikan gambaran secara komprehensif terhadap pengetahuan seseorang. Pengaruh informasi begitu mendominasi persepsi masyarakat dewasa ini sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang lebih kritis daripada sebelumnya, karena sudah tertanam dalam diri bahwa setiap kalimat yang diungkapkan mempunyai dasar informasi yang dianggap faktual. Pengaruh informasi begitu mendominasi persepsi masyarakat dewasa ini sehingga masyarakat memiliki pola pikir yang lebih kritis daripada sebelumnya, karena sudah tertanam dalam diri bahwa setiap kalimat yang diungkapkan mempunyai dasar informasi yang dianggap faktual. sosialisasi sebagai sarana berkomunikasi di lapangan mudah diakses dan diterima oleh masyarakat baik memanfaatkan sosialisasi secara formal, informal, setiap akses informasi terkait KB didapat dengan mudah oleh masyarakat.

b. **Intensitas Komunikasi**

Komunikasi dalam konteks menumbuhkan keyakinan tidak hanya sekedar dilakukan saja, namun dengan menyertakan frekuensi penyampaian didalamnya. komunikasi melalui sosialisasi Program KB rutin dilakukan, metode yang digunakan untuk tetap saling terhubung secara berkala, yakni dengan pendekatan komunikasi formal dan informal, maupun memanfaatkan momen-momen hari besar nasional.

c. **Tingkat Pemahaman Pesan**

Setiap informasi memiliki kapasitas berbeda untuk orang tertentu. Oleh sebab itu, pengelola program harus berkompeten dalam mengelompokkan aneka pokok bahasan dalam penyampaian berbagai informasi yang fleksibel terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan berbahasa masyarakat yang seakan asing dilingkungan Desa/Kelurahan berbeda dengan penduduk yang menetap di wilayah kota. Penulis ingin mengetahui apakah sosialisasi yang diberikan oleh penyuluh KB dapat diterima oleh masyarakat. tingkat pemahaman pesan sudah efektif karena masyarakat paham dan mengerti tentang pelayanan KB yang diberikan oleh DISP3A PPKB Kabupaten Samosir karena DISP3A PPKB Kabupaten Samosir menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat yaitu Bahasa Batak Toba .

d. Perubahan Sikap

Fokus hal ini pada reaksi sikap yang terlihat setelah dilakukannya komunikasi. Perubahan sikap dicirikan dengan partisipasi yang lebih aktif dan antusiasme terhadap setiap layanan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir untuk memperkuat pelayanan Program KB. perubahan sikap terlihat seiring dengan waktu. Persepsi masyarakat melihat Program KB sebagai suatu kewajiban pada beberapa tahun silam, secara bertahap dan berkelanjutan menyebabkan dapat beralih menjadi yakni suatu kebutuhan akan tetapi tidak semua masyarakat mengalami perubahan sikap karena masih adanya masyarakat yang masih belum menerima perkembangan jaman dan masih mengikuti adat istiadat yang mengatakn bahwa “banyak anak banyak rejeki”. Dapat disimpulkan bahwa dalam perubahan sikap masyarakat belum pelayanan kb belum berjalan efektif.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dewi Suhartini (2019) , berjudul “Efektivitas Pelayanan BKKBN dalam Penurunan Angka Kelahiran di Kota Makassar”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Pelayanan KB yang berkualitas berdampak pada kepuasan masyarakat yang di layani dan tetap berdasarkan kode etik dan standar pelayanan yang di ditetapkan. Inovasi dari pelayanan KB dan kompetensi tenaga yang memberikan pelayanan sangat menentukan kualitas pelayan yang di berikan selain faktor lain seperti: alat dan obat kotrasepsi, prasarana dan saran penunjang. Pelayan KB yang berkualitas adalah pelayanan yang memberikan tingkat komplikasi yang rendah dan tingkat kegagalan yang rendah. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa di kota Makasar para masyarkat masih kurang menerima konseling sehingga pemutusan pemilihan alat/cara KB belum sepenuhnya di dasarkan pada pengetahuan yang cukup. Temuan di lapangan itu membuktikan bahwa perlunya informasi yang cukup akan sangat menunjang keberhasilan program KB. Penulisan Dewi Suhartini menunjukan bahwa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB melalui televisi maupun poster/pamflet memperlihatkan pengaruh yang sangat baik terhadap kepesertaan ber KB

Dr. Budiman Purba,M.AP (2018) dari , berjudul “Analisis Bahaya Kebakaran Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta” . Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Efektivitas Pelaksanaan Program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dalam Mengurangi Angka Kelahiran di Kota Medan

Dewi Febriani, (2020) yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi”. Adapun temuan Hasil penelitian ini yakni Program Keluarga Berencana yang di laksanakan BKKBN provinsi Jambi untuk mengendalikan angka kelahiran menghadapi beberapa hambatan seperti: kurangnya petugas lapangan penyuluhan, bertambahnya penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mempengaruhi *unmet need*. Dalam mengatasi permasalahan tersebut BKKBN mengambil solusi yaitu: meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas lapangan penyuluhan, menjamin ketersediaan kontrasepsi, meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal pemerintah harus terus membaca permasalahan dan memberikan solusi yang tepat, cepat dan produktif.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Efektivitas pelayanan keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir (DISP3A PPKB Kabupaten Samosir) dalam mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, belum efektif karena masih 67,8 % dari target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi oleh DISP3A PPKB Kabupaten Samosir dan hanya terdapat empat orang petugas di balai penyuluh yang bertanggungjawab untuk mensosialisasikan program KB untuk 28 desa/kelurahan. Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien, mengingat untuk sosialisasi kepada masyarakat juga pasti membutuhkan waktu yang lama meskipun dengan memperhatikan kepuasan masyarakat akan pelayanan KB berjalan dengan cepat dan akurat, sosialisasi juga dinilai cukup baik, sarana komunikasi di lapangan dapat diakses dan diterima oleh masyarakat, adanya pelatihan yang ditujukan kepada aparatur dinas, petugas puskesmas pembantu dan klinik KB, sarana dan prasarana dinilai juga sudah memenuhi dan dapat dijadikan bahan promotor dalam efektifitas pelayanan

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis sampaikan atas dasar peneitian yang telah penulis lakukan yaitu:

1. Efektivitas pelayanan keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir (DISP3A PPKB Kabupaten Samosir) dalam mengendalikan angka kelahiran di

Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, belum efektif karena masih 67,8 % dari target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi oleh DISP3A PPKB Kabupaten Samosir dan hanya terdapat empat orang petugas di balai penyuluh yang bertanggungjawab untuk mensosialisasikan program KB untuk 28 desa/kelurahan. Hal tersebut dinilai kurang efektif dan efisien, mengingat untuk sosialisasi kepada masyarakat juga pasti membutuhkan waktu yang lama meskipun dengan memperhatikan kepuasan masyarakat akan pelayanan KB berjalan dengan cepat dan akurat, sosialisasi juga dinilai cukup baik, sarana komunikasi di lapangan dapat diakses dan diterima oleh masyarakat, adanya pelatihan yang ditujukan kepada aparatur dinas, petugas puskesmas pembantu dan klinik KB, sarana dan prasarana dinilai juga sudah memenuhi dan dapat dijadikan bahan promotor dalam efektifitas pelayanan

2. Hambatan efektivitas pelayanan keluarga berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir dalam mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah faktor adat istiadat di daerah Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kabupaten Samosir khususnya yang masih menganut sistem patrilineal dimana anak laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan. Atas dasar hal tersebut masyarakat kebanyakan tidak akan ikut KB apabila belum mendapatkan anak laki-laki di dalam keluarganya selanjutnya adanya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Memang hal tersebut adalah tugas pemerintah, namun faktor kesadaran masyarakat untuk mengikuti terapi setelah pemasangan alat kontrasepsi khususnya implant dan suntik sangat dibutuhkan. Hal tersebut berguna agar tidak terjadi drop out terhadap peserta KB dan menjaga peserta KB agar terhindar dari efek samping tidak mengikuti terapi yang berbahaya, yang terakhir adalah personil PKB/PLKB dalam mengkoordinir penyuluhan KB kurang. Kekuatan personil merupakan aspek dasar organisasi dalam pelaksanaan tugas. Hanya terdapat empat orang petugas di balai penyuluh yang bertanggungjawab untuk mensosialisasikan program KB untuk 28 desa/kelurahan.
3. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir dalam mengendalikan angka kelahiran di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah menggunakan

pendekatan skala prioritas pada pembinaan KB, skala prioritas terhadap pembinaan KB adalah hal yang paling solutif dikarenakan hal tersebut dapat menentukan langkah yang efektif dan efisien terhadap semua bidang serta refreshing kader KB dan sosialisasi berkala. Hal ini dilaksanakan demi tercapainya pelayanan KB yang lebih baik dan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini juga bertujuan agar pengetahuan, skill dan semangat perangkat terkait dapat terus berkembang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam Luki Nakita (2020:6).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program aplikasi SAKTI pada Efektivitas Pelayanan Keluarga Berencana Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir Dalam Mengendalikan Angka Kelahiran Di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir (DISP3A PPKB Kabupaten Samosir) serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arsyad umar, 2004. *Pengetahuan Sosial*. Jakarta. Erlangga.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Choiri, Miftachul. 2019. *Metode Penulisan Kualitatif Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.

Given, Lisa M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Thousand Oaks, California: Sage Publication.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.

